

Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Agustina Mutia¹, Achyat Budianto², Mistiani³

¹ Akuntansi syariah, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi

Email : ¹agustinamutia69@gmail.com, ²achyat.ultra@uinjambi.ac.id, ³mistianiaks1810@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 September 2023

Received in revised form 2 Oktober 2023

Accepted 10 November 2023

Available online Desember 2023

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of SIMDA, HR quality and SAP implementation on the quality of government financial reports at the Regional Financial and Asset Management Agency of Merangin Regency. This study uses a quantitative approach with primary data in the form of observations, interviews and questionnaires. Sampling in this study used a purposive sampling technique with a sample of 40 people. In this study using multiple linear regression analysis and testing the hypothesis on the T test and F test and analysis of the coefficient of determination. The results of this study indicate that the implementation of regional management information systems and the quality of human resources have no significant effect on the quality of government financial reports, while the research results for the variable of application of government accounting standards show that they have a significant effect on the quality of financial reports. For simultaneous test results (F test), namely the implementation of regional management information systems, the quality of human resources and the application of government accounting standards have a joint effect on the quality of government financial reports. The results of the coefficient of determination (R²) show that the independent variables namely SIMDA implementation, HR quality and SAP implementation can explain the variable quality of government financial reports by 61%, the remaining 31% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: SIMDA, HR, SAP and Quality of Government Financial Reports.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SIMDA, kualitas SDM dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer berupa hasil observasi, wawancara dan kuesioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel yang berjumlah 40 orang. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan dilakukan pengujian hipotesis pada uji T dan uji F dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa impelementasi sistem informasi manajemen daerah dan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan hasil penelitian untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintah menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk hasil pengujian secara simultan (uji F) yaitu impelementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Adapun hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel independen yaitu impelementasi SIMDA, kualitas SDM dan penerapan SAP dapat menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 61% sisanya 31% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

Kata kunci: *SIMDA, SDM, SAP dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*

1. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan hal ini akan semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintah. Organisasi sektor publik di tuntut untuk mengedepankan akuntabilitas salah satu bentuk indikator yang dapat menunjukkan akuntabilitas adalah laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai salah satu *pure-non profit organization* juga tak lepas dari tuntutan akuntabilitas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari badan pengawas keuangan (BPK). Opini audit laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam pengambilan keputusan karena opini yang diberikan adalah pernyataan kewajaran tentang posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.¹ Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya.²

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern. Faktor yang pertama adalah sumber daya manusia merupakan manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi serta memiliki potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (*non material*) di dalam organisasi. Seperti halnya kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi sistem belum dapat sepenuhnya membantu dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini disebabkan masih banyak kelemahan yang terkait yang dapat menghambat penyusunan laporan keuangan. BPKP dalam hal ini memberikan respon positif dengan mengembangkan sebuah program aplikasi komputer yang diberinama SIMDA (sistem informasi manajemen daerah) yang mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006. Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pmda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pengembangan perangkat lunak aplikasi SIMDA memiliki 4 tujuan, yaitu pertama menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan, layanan publik, menghasilkan informasi komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan acuan sebagai pengambilan keputusan.

Standar akuntansi pemerintahan menurut (PP 71, 2010), mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.

¹Junaidi and Nurdiono, *Kualitas Audit Perspektif Opini Going Concern* (Yogyakarta: ANDI, 2016), 15.

²I Gde Yoga Permana and Ida Ayu Putu Widnyani, *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2020), 2.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah”.

Menurut dari pengamatan bahwa penggunaan aplikasi SIMDA di BPKAD masih belum optimal dan terdapat kendala pada aplikasi tersebut yaitu aplikasi simda belum mampu memanipulasi kesalahan apabila terjadi kesalahan di dalam penginputan dan pengolahan data artinya aplikasi tersebut tidak dapat mengcover apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penggunanya dan hanya sedikit operator SIMDA keuangan tersebut. Menurut Nurillah dalam Achdar Sanjaya ada beberapa indikator dari Sumber daya manusia yaitu terkait pemahaman tentang akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya yang memadai, peran dan tanggungjawab, pelatihan keahlian dan tugas, sosialisasi peraturan baru dan pemahaman tentang struktur organisasi.³ Dari indikator tersebut fenomena mengenai sumber daya manusia dari staf yang tergabung ada beberapa yang menyangkut faktor pendidikan serta bidangnya yaitu sebanyak 31 orang yang tidak berlakuk pendidikan akuntansi atau keuangan dan terdapat beberapa yang tidak mendapatkan pelatihan khusus dibidang akuntansi.

Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan, sedangkan sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan (PUSAP). Dampaknya terdapat perbedaan SAP pusat dan SAP daerah mulai dari kebijakan akuntansi dan lainnya dan akhirnya berdampak pula pada penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2019-2021 kepada pemerintah kota jambi dan pemerintah Kabupaten Merangin.

Tabel 1. 1
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

No.	Tahun	Hasil Pemeriksaan	Catatan	Sumber
1.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian	Masih terdapat beberapa masalah/temuan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain pengelolaan barang milik daerah (BMD) belum tertib dan masih terjadi kesalahan klasifikasi jenis belanja pada anggaran dan realisasi. ⁴	Jambi.bpk.go.id
2.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian	Meskipun LKPD meraih WTP untuk tahun Anggaran 2020 akan tetapi tidak lepas dari dari pengelolaan aset daerah kabupaten merangin, Bupati merangin mengakui teritorial merangin yang luas dengan aset yang begitu banyak sempat menjadi temuan sebelumnya dan juga permasalahan terkait dengan bukti fisik dan surat keterangan adanya aset itu tidak sinkron.	TribunJambi.Com
3.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian	Meskipun LKPD kabupaten merangin tahun 2021 layak meraih WTP, namun ada sejumlah catatan yang harus	meranginkab.go.id

³Achdar Sanjaya, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Soppeng),” *E- Jurnal Akuntansi*, no. 3153 (2017).

⁴Jambi.bpk.go.id. “Opini WTP atas LKPD Kota Jambi dan Kabupaten Merangin TA 2019”, 2020. Accessed Oktober 18, 2022. <https://jambi.bpk.go.id/opini-wtp-atas-lkpd-kota-jambi-dan-kabupaten-merangin-ta-2019/>

			dipenuhi untuk segera dilaksanakan. ⁵	
--	--	--	--	--

Sumber: *Jambi.bpk.go.id*

Berdasarkan tabel diatas menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten merangin untuk tahun 2019-2020 telah meraih opini wajar tanpa pengecualian akan tetapi masih ada catatan masalah yang masih harus dipenuhi, laporan keuangan pemerintah daerah yang baik memiliki faktor yaitu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sedangkan standar akuntansi pemerintah yang baik meliputi secara wajar sedangkan dilaporan keuangan tersebut terdapat temuan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2020 tidak lepas dari pengelolaan aset daerah kabupaten merangin yaitu terdapat temuan bukti fisik dan surat keterangan aset tidak sinkron. Sedangkan menurut standar akuntansi pemerintah/ PP no. 71 tahun 2010 karakteristik laporan keuangan adalah salah satunya andal yaitu bebas dari kesalahan material dan penyajian secara jujur.

Sedangkan menurut Dandi dan Rasyid, opini WTP adalah opini yang bebas dari ketidakwajaran, dan opini wajar dengan pengecualian merupakan opini terbaik setelah WTP. Untuk opini WDP dinilai bebas dari salah saji laporan keuangan meskipun ada ketidakwajaran atau temuan dan catatan tambahan dalam intern tertentu, namun tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.⁶ Akan tetapi menurut Afni Noorani Dkk menyatakan bahwa opini WDP diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan pengecualian. Hal yang dikecualikan ini berupa rekening atau item tertentu.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh impelementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

New Public Management (NPM)

New Public Management(NPM) sebagai perubahan paradigma lama ke paradigma baru dalam memberikan pelayanan kepada publik. Janet dan Robert mengatakan bahwa *new public management* adalah sebuah gerakan perampingan sektor publik dan membuatnya lebih komporatif dan mencoba untuk membuat administrasi publik yang lebih respontif terhadap kebutuhan warga dengan menawarkan pengukuran ekonomi, efisien dan efektivitas (*value for money*), fleksibilitas pilihan dan transparansi.⁸ *New Public Management* (NPM) diyakini mempunyai peran yang efektif bagi reformasi bagi sektor publik. Akuntansi sektor publik menempati peranan penting dalam dalam agenda *new public management* (NPM) dikarenakan pada penerapan *new public management* (NPM) terkait pada konsep manajemen kinerja sektor publik dimana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan satu dari beragam informasi yang digunakan pengguna dalam mengambil keputusan. Hal ini berarti penyusunan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan, dapat menjadikan laporan keuangan tersebut berguna, karakteristik informasi keuangan meliputi relevansi, penyajian jujur, dapat dibandingkan, ketetapan waktu, dapat diverifikasi dan dapat dipahami.⁹ Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi

⁵Meranginkab. go.id, “ Pemkab Merangin Raih WTP dari BPK RI,” 2022. Accessed Oktober oktober 18, 2022. <https://meranginkab.go.id/detail/berita/lagi-pemkab-merangin-raih-wtp-dari-bpk-ri>

⁶Dandi Darmadi and Rasyid Thaha, “Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan” 8 (1) (June 2019): 76.

⁷Afni Nooraini, Chatarina De Ricci R Mamulak, and Marja Sinurat, “Pengaruh Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Di Kabupaten Timor Tengah Utara” 02, no. 1 (June 2022): 3.

⁸Eko Sudarmanto, Arin Tentrem Mawati, and Nur Arif Nugraha, *Manajemen Sektor Publik* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 73.

⁹Yadiati and Mubarak, *Kualitas Laporan Keuangan: Kajian Teoritis Dan Empiris*, 2017, 8.

keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan.¹⁰

b. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan indikator antara lain:

1. Dapat Dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat Dibandingkan

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Daerah

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara manual atau melalui aplikasi komputer diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah sesuai dengan pasal 33 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006. Sistem informasi manajemen daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan.

b. Indikator Sistem Informasi Manajemen Daerah

Indikator sistem informasi manajemen daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi atau komputer
2. Ketersediaan software
3. Ketersediaan jaringan Internet
4. Sistem akuntansi SKPD
5. Ketersediaan brainware (sumber daya manusia)

Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang memiliki peran serta posisi strategis dalam organisasi. Sumber daya manusia sebagai individu yang siap, memiliki kemampuan memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi, sebagai individu yang memiliki kontribusi pada lingkungan organisasi disebut sebagai karyawan, pegawai, tenaga kerja dan personil. Menurut Marisi dkk sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siap siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.¹¹

Sumber daya manusia merupakan kunci pokok bagi organisasi dalam menjalankan tujuannya, sumber daya manusia memiliki beberapa istilah, menurut para ahli ada beberapa istilah untuk menyebut sumber daya manusia yaitu personalia, kepegawaian, *human resources* dan *man power*.¹²

b. Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan keahlian dan tugas
2. Pendidikan
3. Pembinaan
4. kesempatan atau peluang
5. Penghargaan

¹⁰Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: ANDI, 2016.), 134.

¹²Ajabar, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sleman: Cv. Budi Utama, 2020.), 4.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

a. Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Jan Hoesada sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Standar akuntansi pemerintah menurut (PP 71, 2010) dapat diterapkan secara bertahap dari SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan.

b. Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut (anggota IKAPI, 2011:262) indikator penerapan standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi
2. Nilai historis
3. Realisasi
4. Subtansi mengungguli bentuk formal
5. Periodisitas
6. Konsistensi
7. Pengungkapan kelengkapan
8. Penyajian wajar¹³

B. Hubungan antar variabel

Hubungan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Adanya program SIMDA ini menunjukkan bahwa penggunaan perangkat teknologi komputer dalam pengelolaan keuangan turut menunjang agar dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penggunaan teknologi informasi ini memudahkan pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dievaluasi dengan empat atribut akurasi, tepat waktu, kelengkapan, dan konsistensi..

Hubungan Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai SAP, akan tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang baik akan sulit untuk mencapai atau menyusun laporan keuangan yang berkualitas.¹⁴ Dalam pengelolaan keuangan daerah tentu harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

3. METODOLOGI PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu metode yang menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel.

b. Lokasi dan Objek Penelitian

¹³Heru Kreshna and Melly Susanti, *Akuntansi Pemerintah Edisi I* (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022.).

¹⁴Ifat Fauziah, *Standar Akuntansi Pemerintah* (Jakarta: ILMU, 2018), 150.

Adapun yang menjadi lokasi di dalam penelitian ini adalah di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.

c. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini merupakan data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuisioner dengan menggunakan pernyataan berdasarkan indikator variabel serta dengan pengukuran menggunakan *skala likert 5* poin.

d. Populasi dan sampel

populasi didalam penelitian ini sebanyak 40 orang dengan teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri yang diinginkan didalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1
Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	40	17	30	25,50	2,670
x2	40	14	30	24,12	2,775
x3	40	13	30	24,80	2,633
y	40	18	30	25,40	2,734
Valid N (listwise)	40				

sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, total data yang diperoleh yaitu sebanyak 40 data. Tabel tersebut menggambarkan statistik deskriptif untuk variabel independen (SIMDA, SDM DAN SAP), variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah). Berikut adalah penjelasan dari variabel independen terkait statistik deskriptif

a. sistem informasi manajemen daerah

Variabel SIMDA menunjukkan nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 30 dengan rata-rata (*mean*) yaitu 25, 50 dan standar deviasi yaitu 2,670. Nilai minimum untuk variabel SIMDA terjadi pada kualitas laporan keuangan pemerintah yang memiliki nilai yaitu 14, sedangkan nilai maksimum terjadi pada laporan keuangan pemerintah memiliki nilai daerah yaitu 30.

b. Kualitas sumber daya manusia

Variabel sdm menunjukkan nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 30 dengan rata-rata (*mean*) yaitu 24, 12 dan standar deviasi yaitu 2775. Nilai minimum untuk variabel SDM terjadi pada kualitas laporan keuangan pemerintah yang memiliki nilai 14, sedangkan nilai maksimum terjadi pada laporan keuangan pemerintah memiliki nilai yaitu 30.

c. Penerapan standar akuntansi pemerintah

Variabel SAP menunjukkan nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 30 dengan rata-rata (*mean*) yaitu 24, 80 dan standar deviasi yaitu 2,663. Nilai minimum untuk variabel penerapan SAP terjadi pada kualitas laporan keuangan pemerintah yang memiliki nilai yaitu 13, sedangkan nilai maksimum terjadi pada laporan keuangan pemerintah memiliki nilai yaitu 30.

d. Kualitas laporan keuangan pemerintah

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30 dengan rata-rata (*mean*) yaitu 25, 40 dan standar deviasi yaitu 2,734. Nilai minimum untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah terjadi pada kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu 14, sedangkan nilai maksimum terjadi yaitu 30.

2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji valid atau tidak validnya butir pernyataan. Dalam uji validitas penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kepercayaan dengan $\alpha = 0.05$ r tabel dalam penelitian ini yaitu 0,1966. Data dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai tabel dan dinilai signifikan yaitu 0,05.

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji validasi dari 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang.

1) Sistem Informasi Manajemen daerah

Tabel 4. 2

Hasil Uji Validitas sistem Informasi Manajemen Daerah

Pernyataan	r ^{hitung}	r ^{tabel}	Keterangan
X1.1	0,756	0,2845	Valid
X1.2	0,667	0,2845	Valid
X1.3	0,673	0,2845	Valid
X1.4	0,704	0,2845	Valid
X1.5	0,746	0,2845	Valid
X1.6	0,593	0,2845	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah dinilai valid untuk semua item dimana r dihitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,2845. Oleh karena itu masing-masing pernyataan diatas yang ada pada variabel sistem informasi manajemen daerah layak dan dapat diandalkan dalam penelitian ini.

2) Kualitas sumber daya manusia

Tabel 4. 3

Hasil Uji Validitas Kualitas Sumber Daya Manusia

Pernyataan	r ^{hitung}	r ^{tabel}	Keterangan
X2.1	0,826	0,2845	Valid
X2.2	0,741	0,2845	Valid
X2.3	0,799	0,2845	Valid
X2.4	0,729	0,2845	Valid
X2.5	0,826	0,2845	Valid
X2.6	0,328*	0,2845	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah dinilai valid untuk semua item dimana r dihitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,2845. Oleh karena itu masing-masing pernyataan diatas yang ada pada variabel sistem informasi manajemen daerah layak dan dapat diandalkan dalam penelitian ini.

3) Standar akuntansi pemerintah

Tabel 4. 4

Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintah

Pernyataan	r ^{hitung}	r ^{tabel}	Keterangan
X3.1	0,734	0,2845	Valid
X3.2	0,789	0,2845	Valid
X3.3	0,839	0,2845	Valid
X3.4	0,866	0,2845	Valid
X3.5	0,837	0,2845	Valid
X3.6	0,68*	0,2845	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah dinilai valid untuk semua item dimana r dihitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,2845. Oleh karena itu masing-masing pernyataan diatas yang ada pada variabel sistem informasi manajemen daerah layak dan dapat diandalkan dalam penelitian ini.

4) Kualitas laporan keuangan pemerintah

Tabel 4. 5

Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,752	0,2845	Valid
X1.2	0,873	0,2845	Valid
X1.3	0,663	0,2845	Valid
X1.4	0,744	0,2845	Valid
X1.5	0,754	0,2845	Valid
X1.6	0,823	0,2845	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah dinilai valid untuk semua item dimana r dihitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,2845. Oleh karena itu masing-masing pernyataan diatas yang ada pada variabel sistem informasi manajemen daerah layak dan dapat diandalkan dalam penelitian ini.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan/ pernyataan yang digunakan, Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan tingkat/ taraf signifikan yang digunakan lebih besar dari 0,70. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terdapat seluruh pertanyaan untuk lebih satu variabel, berikut adalah hasil uji reliabilitas dengan 40 responden:

Tabel 4. 6

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Nilai Batas	Keterangan
Sistem informasi manajemen daerah	0,760	0,70	Realibel
Sumber daya manusia	0,814	0,70	Realibel
Standar akuntansi pemerintah	0,870	0,70	Realibel
Laporan keuangan pemerintah	0,859	0,70	Realibel

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.10 diatas nilai *Cronbach's alpha* pada variabel Sistem informasi manajemen daerah menunjukkan nilai 0,760, Sumber daya manusia 0,814, Standar akuntansi pemerintah 0,870 dan Laporan keuangan pemerintah 0,859. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam kuisisioner penelitian realibel karena nilai *Cronbach's alpha* diatas lebih besar dari 0,70.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4. 7
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		1,58631222
Most Extreme Differences	Absolute		,132
	Positive		,132
	Negative		-,109
Test Statistic			,132
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,077
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		,078
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,071
		Upper Bound	,085
a. Test distribution is Normal.			

Sumber: Output SPSS 27 Diolah

Berdasarkan tabel 4.11, hasil dari uji normalitas dengan melakukan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan yaitu sebesar 0,077. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data-data variabel yang digunakan telah memenuhi distribusi normal.

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dapat dilihat dari tabel *corelation matrix* dalam output SPSS *logistic regression*. Dalam *tolerance* jika nilai tersebut menunjukkan = 0, 10 sama dengan tingkat *corelation* 0,95, jika nilai *corelation* menunjukkan kurang dari 0,95 maka tidak terjadi multikolinieritas.¹⁵

Tabel 4. 8
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,500		3,146		
	X1	,145		,109	,145	,834
	X2	-,019		,128	-,019	,594
	X3	,751		,136	,743	,551
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Output SPSS 27 diolah

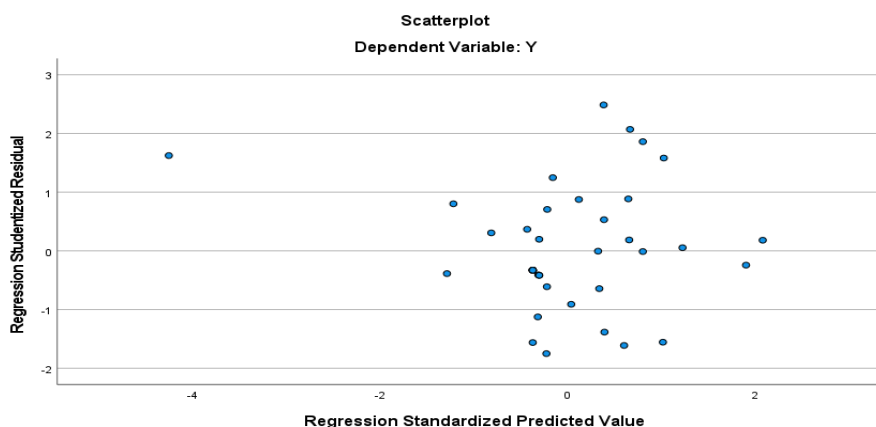
Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil uji multikolonieritas variabel sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah memiliki *tolerance* > 0,01, dimana variabel sistem informasi manajemen daerah (X₁) memiliki nilai 0,834 dengan nilai VIF <10 yaitu sebesar 1,200. Kemudian untuk variabel

¹⁵Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 107.

kualitas sumber daya manusia memiliki nilai *tolerance* > 0,01, dimana variabel kualitas sumber daya manusia (X_2) memiliki nilai 0,594 dengan nilai VIF <10 yaitu sebesar 1,684 dan untuk variabel standar akuntansi pemerintah (X_3) memiliki nilai 0,551 dan nilai VIF <10 yaitu sebesar 1,815. maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji multikolinieritas pada tabel diatas tidak terjadi multikolinieritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4. 1
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: *Output SPSS 27* diolah

Berdasarkan gambar 4.2 diatas hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa titik-titik terlihat menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan gambar grafik tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada gambar diatas.

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 9
Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,500	3,146		1,113	,273
	X1	,145	,109	,145	1,329	,192
	X2	-,019	,128	-,019	-,149	,882
	X3	,751	,136	,743	5,515	,000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4. 13 diatas hasil dari uji linier berganda diperoleh sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 3,500 + 0,145X_1 - 0,019X_2 + 0,751X_3$$

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut:

a) Konstan (α) = 3,500

ini merupakan jika semua variabel independen dianggap sama dengan (0) maka nilai dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah) sebesar 3,500.

b) Implementasi sistem informasi manajemen daerah (X_1) = 0,145

Nilai koefisien regresi Implementasi sistem informasi manajemen daerah bertanda positif dengan kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,145. hal ini menunjukkan bahwa jika implementasi sistem informasi manajemen daerah meningkat 1% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 0,145 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bersifat konstan.

c) Kualitas sumber daya manusia (X_2) = - 0,019

Nilai koefisien regresi kualitas sumber daya manusia (X_2) sebesar -0,019 Dengan arah hubungan negatif (berlawanan arah) menunjukkan bahwa apabila kualitas sumber daya manusia mengalami kenaikan 1% maka akan diikuti oleh penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah akan menurun sebesar 0,019 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.¹⁶

d) Penerapan standar akuntansi pemerintah (X_3) = 0,751

Nilai koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintah bertanda positif dengan kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,751. hal ini menunjukkan bahwa jika implementasi sistem informasi manajemen daerah meningkat 1% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 0,751 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bersifat konstan.

a. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Tabel 4. 10
Hasil Uji R2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,800 ^a	,640	,610	1,651
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Output SPSS 27 diolah

Berdasarkan pada tabel 4.14 terdapat nilai Adjusted R Square sebesar 0,610= 61%, hal ini menunjukkan variabel independen (implementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah) sebesar 61% dan sisanya 39% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak terdapat didalam penelitian ini.

b. Uji Singnifikan Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 4. 11
Hasil uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,500	3,146		1,113	,273
	X1	,145	,109	,145	1,329	,192
	X2	-,019	,128	-,019	-,149	,882
	X3	,751	,136	,743	5,515	,000
a. Dependent Variable: Y						

Sumber : Output SPSS 27 diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji parsial nilai T_{tabel} yaitu sebesar 1,684 jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut Penjelasan hasil uji parsial adalah sebagai berikut:

¹⁶Evrina A. Rozi, Repilia Mariana, and Achyat Budianto, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Tekstil Dan Garmen Terdaftar Go Publik Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022," *Jurnal Maneksi* Vol 12, no. 2 (June 2023): 429.

- a) Variabel Implementasi sistem informasi manajemen daerah (X_1) diperoleh nilai T_{hitung} sebesar 1,329 dengan $<T_{tabel}$ 1,684 dan nilai signifikan 0,192. Kesimpulannya adalah T_{hitung} 1,329 dan nilai signifikannya $>0,05$, yang berarti H_0 diterima dan H_{a1} ditolak atau variabel implementasi sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- b) Variabel kualitas sumber daya manusia (X_2) diperoleh nilai T_{hitung} sebesar -0,149 dengan $<T_{tabel}$ 1,684 dan nilai signifikan 0,882. Kesimpulannya adalah T_{hitung} -0,149 dan nilai signifikannya $>0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_{a2} ditolak yang artinya variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- c) Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X_3) diperoleh nilai T_{hitung} sebesar 5,515 dengan $>T_{tabel}$ 1,684 dan nilai signifikan 0,000. Kesimpulannya adalah T_{hitung} 5,515 dan nilai signifikannya $<0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_{a3} diterima yang artinya variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

c. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 4. 12
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	174,636	3	58,212	21,354	,000 ^b
	Residual	98,139	36	2,726		
	Total	272,775	39			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: Output SPSS 27 diolah

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa hasil uji F_{hitung} yaitu 21,354 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,606 sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 yang mana $<0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan tabel 4.15, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai T_{hitung} sebesar 1,329 dengan $<T_{tabel}$ 1,684 dan nilai signifikan 0,192 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka H_0 diterima dan H_{a1} ditolak yang artinya variabel implementasi sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handia Fahrurrozi (2019) yang menyatakan bahwa Sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.¹⁷

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan tabel 4.15, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai T_{hitung} sebesar -0,149 dengan $<T_{tabel}$ 1,684 dan nilai signifikan 0,882. Kesimpulannya adalah T_{hitung} -0,149 dan nilai signifikannya $>0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_{a2} ditolak yang artinya variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut hasil penelitian Ratna Wijayanti dan Nur Handayani (2017) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dikarenakan tingkat signifikan 0,237 yaitu lebih besar dari 0,05¹⁸

¹⁷Handia Fahrurrozi, "Pengaruh Penggunaan Simda Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Brang Milik Daerah." *AKURASI* vo. 1, no. 2 (2019): 133.

¹⁸Ratna Wijayanti and Nur Handayati, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* vol.06, no. 3 (March 2017).

Pengaruh Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan tabel 4.15, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai T_{hitung} sebesar 5,515 dengan $>T_{tabel}$ 1,684 dan nilai signifikan 0,000. Kesimpulannya adalah T_{hitung} 5,515 dan nilai signifikannya $<0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_{a3} diterima yang artinya variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_{a3}) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diterima.

Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusiadan Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa hasil uji F_{hitung} yaitu 21,354 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,606 sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 yang mana $<0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alisha dengan M. Khoiril Abidin, Afifudin dan Junaidi (2018) menyatakan bahwa pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan penetapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dievaluasikan dengan empat atribut akurasi, tepat waktu, kelengkapan, dan konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi SIMDA keuangan dapat menghasilkan informasi yang lebih baik dibandingkan data manual. Jika sumber daya manusia memiliki kemampuan atau keahlian sesuai bidangnya dan mampu menjalankan dengan baik didalam membuat laporan keuangan dan standar yang digunakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dan secara keseluruhan penerapan faktor sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah akan menciptakan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dan membuka peran pemerintah lebih berfokus pada kepentingan publik yang lebih luas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengaruh implementasi sistem informasi manajemen, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), maka telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini:

- a. Implementasi sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
Hasil variabel simda tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dikarenakan aplikasi simdatidak dapat tercover dari sisi keandalan apabila terjadi kesalahan penginputan data dan relevansi menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh simdadimana pengguna simdalah yang mampu memilah data inputan yang memiliki keandalan.
- b. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, dikarenakan tingkat pendidikan yang sesuai bidang akuntansi masih belum cukup meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.
- c. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotesis ketiga yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah secara signifikan.
- d. Berdasarkan hasil uji F (variabel independen) implementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajabar, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2020, 4.
- [2] Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI, 2016.
- [3] Butar butar, Marisi, Efendi, and Wiranto. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [4] Cen, Cia Cia. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Indonesia: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- [5] Heru Kreshna and Mel¹ly Susanti, *Akuntansi Pemerintah Edisi I* (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022.).
- [6] Ifat Fauziah. *Standar Akuntransi Pemerintah*. Jakarta: ILMU, 2018.
- [7] Imam, Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [8] Junaidi and Nurdiono. *Kualitas Audit Perspektif Opini Going Concern*. Yogyakarta: ANDI, 2016 [34] Yadiati and Mubarak, *Kualitas Laporan Keuangan: Kajian Teoritis Dan Empiris*, 2017, 8.
- [9] Abidin M. Khoirul, Afifudin, and Junaidi. “Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang” vo. 07 (Agustus 2018): 130.
- [10] A. Rozi, Evrina, Repilia Mariana, and Achyat Budianto. “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Tekstil Dan Garmen Terdaftar Go Publik Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.” *Jurnal Maneksi* Vol 12, no. 2 (n.d.).
- [11] Darmadi, Dandi, and Rasyid Thaha. “Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan” 8 (1) (June 2019).
- [12] Evrina A. Rozi, Repilia Mariana, and Achyat Budianto, “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Tekstil Dan Garmen Terdaftar Go Publik Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022,” *Jurnal Maneksi* Vol 12, no. 2 (June 2023): 429.
- [13] Fahrurrozi, Handia. “Pengaruh Penggunaan Simda Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Brang Milik Daerah.” *AKURASI* vo. 1, no. 2 (2019).
- [14] Nooraini, Afni, Chatarina De Ricci R Mamulak, and Marja Sinurat. “Pengaruh Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Di Kabupaten Timor Tengah Utara” 02, no. 1 (June 2022): 3.
- [15] Ratna Wijayanti and Nur Handayati, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Impelementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* vol 06, no. 3 (March 2017).
- [16] Sanjaya, Achdar. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Soppeng).” *E-Jurnal Akuntansi*, no. 3153 (2017).
- [17] Jambi.bpk.go.id. “Opini WTP atas LKPD Kota Jambi dan Kabupaten Merangin TA 2019”, 2020. Accessed Oktober 18, 2022. <https://jambi.bpk.go.id/opini-wtp-atas-lkpd-kota-jambi-dan-kabupaten-merangin-ta-2019/>
- [18] Meranginkab. go.id, “Pembahasan WTP dari BPK RI,” 2022. Accessed Oktober oktober 18, 2022. <https://meranginkab.go.id/detail/berita/lagi-pembahasan-wtp-dari-bpk-ri>